

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : MOHAMAD GOZALI
NIK : 6105011109640004
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG
Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
Sub Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
Jabatan : HAKIM TINGGI
Jenis Laporan : Periodik - 2025
Tanggal Kirim : 6 Januari 2026

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MOHAMAD GOZALI**
2. Jabatan : **HAKIM TINGGI**
3. NHK : **269256**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **24.896.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 172 m2/200 m2 di KAB / KOTA SINTANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah Seluas 19.600 m2 di KAB / KOTA SINTANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.568.000.000
3. Tanah Seluas 20.000 m2 di KAB / KOTA SINTANG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. Tanah Seluas 20.000 m2 di KAB / KOTA SINTANG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. Tanah Seluas 15.400 m2 di KAB / KOTA SINTANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.232.000.000
6. Tanah Seluas 7.752 m2 di KAB / KOTA SINTANG, HASIL SENDIRI Rp. 980.000.000
7. Tanah Seluas 2.000 m2 di KAB / KOTA SINTANG, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 1.800 m2/96 m2 di KAB / KOTA SINTANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000.000
9. Tanah Seluas 13.731 m2 di KAB / KOTA SINTANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.785.000.000
10. Tanah Seluas 17.325 m2 di KAB / KOTA SINTANG, HASIL SENDIRI Rp. 3.811.000.000
11. Tanah Seluas 13.390 m2 di KAB / KOTA SINTANG, HASIL



SENDIRI Rp. 1.470.000.000

12. Tanah Seluas 20.000 m2 di KAB / KOTA SINTANG, HASIL

SENDIRI Rp. 1.600.000.000

13. Tanah Seluas 15.000 m2 di KAB / KOTA SINTANG, HASIL

SENDIRI Rp. 2.400.000.000

14. Tanah Seluas 10.000 m2 di KAB / KOTA SINTANG, HASIL

SENDIRI Rp. 1.400.000.000

15. Tanah Seluas 15.000 m2 di KAB / KOTA SINTANG, HASIL

SENDIRI Rp. 750.000.000

16. Tanah Seluas 10.000 m2 di KAB / KOTA SINTANG, HASIL

SENDIRI Rp. 360.000.000

17. Tanah Seluas 15.000 m2 di KAB / KOTA SINTANG, HASIL

SENDIRI Rp. 90.000.000

18. Tanah Seluas 360.000 m2 di KAB / KOTA MELAWI, HASIL

SENDIRI Rp. 2.350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

375.500.000

1. MOTOR, YAMAHA VEGA ZR SEPEDA MOTOR Tahun 2010,

HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000

2. MOTOR, YAMAHA VEGA ZR SEPEDA MOTOR Tahun 2010,

HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000

3. MOBIL, SUZUKI JIMNY JEEP Tahun 1982, HASIL SENDIRI Rp.

20.000.000

4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI

Rp. 2.500.000

5. MOBIL, INNOVA VENTURE Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.

350.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp.

68.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp.

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp.

17.300.000

F. HARTA LAINNYA

Rp.

Sub Total

Rp.

25.356.800.000

III. HUTANG

Rp.

2.481.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

22.875.800.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.